



**CATATAN UMUM DAN REKOMENDASI
INPRES RAN
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
2019-2024**

RAN KSB perlu menyoroti upaya peningkatan akuntabilitas dalam perizinan untuk mencegah korupsi

Inpres ini belum menyoroti tiga permasalahan utama sistem pengelolaan kelapa sawit sebagaimana diidentifikasi oleh KPK



Tidak akuntabelnya sistem pengendalian dalam perizinan perkebunan kelapa sawit



Tidak efektifnya pengendalian pungutan ekspor kelapa sawit



Tidak optimalnya pungutan pajak sektor kelapa sawit oleh Direktorat Jenderal Pajak

- 1** Membangun sistem informasi perizinan yang integral dan transparan serta terbuka untuk dipantau oleh publik
- 2** Memasukkan ketentuan penataan perizinn berdasarkan tata ruang, lingkungan hidup, dan penguasaan lahan ke dalam aturan perizinan perkebunan
- 3** Membangun sistem rekonsiliasi data pungutan ekspor dan realisasi ekspor kelapa sawit yang terintegrasi
- 4** Integrasi dan pengecekan silang antara data izin usaha perkebunan dan HGU dan data Wajib Pajak
- 5** Penindakan hukum terhadap Wajib Pajak yang tidak mematuhi ketentuan perpajakan

Penyelesaian status lahan perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan tidak boleh hanya legalisasi



KLHK mencatat lebih dari 3,1 juta ha perkebunan sawit yang berada di kawasan hutan. Dan 576.983 ha diantaranya berada dalam proses permohonan pelepasan kawasan hutan, sisanya 2.548.880 ha tidak ada permohonan

Salah satu mandat inpres ini kepada Menteri LHK adalah untuk menyelesaikan status lahan perkebunan kelapa sawit yang terindikasi dalam kawasan hutan. Pertanyaannya apakah perkebunan kelapa sawit yang terlanjur ditanam di kawasan hutan, terutama milik perusahaan sawit besar atau korporasi akan otomatis diputihkan/legalisasi agar status lahannya “selesai”?



REKOMENDASI

Tetap diperlukannya pendekatan litigasi kepada pihak perusahaan yang melakukan pelanggaran hukum



Penyelesaian status kebun sawit masyarakat dalam kawasan hutan harus membedakan antara pekebun/sawit rakyat dan pihak yang hanya mengatasnamakan mereka

Kebijakan legalisasi terhadap kertelanjangan sawit yang berada dalam kawasan hutan seharusnya bersifat affirmative action sehingga berfokus pada beberapa pihak saja

**Pencegahan
kebakaran hutan
dan lahan harus
lebih ditekankan
melalui
penegakan hukum
lingkungan
kepada para
pembakar**



Inpres ini tidak menginstruksikan adanya penindakan hukum baik secara pidana maupun perdata mengenai kasus pembakaran lahan yang mengakibatkan berbagai permasalahan yang ada di daerah.

Analisis dari Greenpeace Indonesia hanya dua grup dari dua belas grup perusahaan kelapa sawit dengan area kebakaran terbesar dalam konsesi mereka dengan rentang waktu tahun 2015-2018 yang dijatuhi sanksi perdata dan administratif dengan tegas

A tropical landscape featuring a river on the left, a grassy bank, and a dense line of palm trees in the background under a cloudy sky.

REKOMENDASI

Tetap diperlukannya pendekatan litigasi kepada pihak perusahaan yang melakukan pelanggaran hukum

Ketiadaan transparansi melemahkan proses-proses menuju akuntabilitas perizinan dan pencapaian perkebunan sawit berkelanjutan

Inpres ini sudah menyadari bahwa permasalahan yang kerap ditemui dalam tata kelola industri sawit nasional adalah sinkronisasi data antar instansi. Namun sayangnya Inpres ini tidak menginstruksikan adanya publikasi data perizinan perkebunan sawit secara transparan yang dapat diakses oleh publik



REKOMENDASI

- 1** Perlu dimasukkannya peningkatan transparansi terkait data perizinan dan dalam hal penyelesaian status lahan di kawasan hutan dalam mandate, program, maupun kegiatan RAN KSB
- 2** Proses dan hasil penyelesaian status lahan di kawasan hutan harus dibuka ke publik untuk meminimalkan resiko korupsi dan penyalahgunaan wewenang/kekuasaan
- 3** Laporan pelaksanaan berbagai mandat dalam Inpres ini harus dapat diakses oleh publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

CATATAN UNTUK IMPLEMENTASI

Dalam implementasi, perlu ada penekanan pada sinergi, partisipasi, dan proses multi pihak

Perlu ada strategi transisi antar pemerintahan agar rencana aksi ini dapat terus dilanjutkan bahkan setelah pemerintahan berganti

Madani

 @madaniberkelanjutan.id

 @yayasanmadani

 Madani Berkelanjutan

 www.madaniberkelanjutan.id